

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pada faktor Anggaran, rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Kupang dipengaruhi oleh lemahnya perencanaan. Banyak perangkat daerah menyusun rencana tanpa berbasis data dan hasil Musrenbang, sehingga program tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan kegiatan, rendahnya efektivitas pembangunan, serta menurunnya akuntabilitas pemerintah daerah.
2. Pada faktor administrasi, yang menjadi permasalahannya adalah adanya kesalahan pemakaian akun belanja, kesalahan dalam pengetikan dan salah reduksi yang dapat menghambat penyerapan anggaran. Kesalahan kesalahan tersebut sering terjadi karena diberikannya beban kerja yang tinggi kepada pegawai sehingga pegawai sering merasa kelelahan dan menjadi kurang fokus dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.
3. Pada faktor sumber daya manusia, kualitas SDM yang belum merata, khususnya dalam penguasaan teknologi komputer di BKAD Kota Kupang, menjadi kendala dalam proses administrasi keuangan daerah. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, karena pegawai yang lebih mahir harus membantu pegawai lain yang belum kompeten.

Rendahnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai semakin memperparah masalah ini, sehingga berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran daerah.

4. Pada faktor dana operasional, rendahnya realisasi belanja langsung di triwulan I dan II pada Pemerintah Kota Kupang disebabkan oleh keterlambatan tersedianya dana operasional. Kondisi ini menghambat pelaksanaan program dan kegiatan sejak awal tahun, sehingga banyak kegiatan baru dapat berjalan efektif mulai triwulan III. Akibatnya, penyerapan anggaran menjadi tidak merata dan cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran, yang berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program.
5. Pada faktor dana alokasi umum, rendahnya realisasi belanja operasi di triwulan I dan II Pemerintah Kota Kupang disebabkan oleh keterlambatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Kondisi ini turut menghambat, karena keterlambatan transfer dari pusat menunda pembayaran gaji pegawai dan menurunkan penyerapan anggaran di awal tahun, menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal daerah.
6. Pada faktor pengadaan barang dan jasa, keterlambatan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kupang terutama disebabkan oleh lemahnya koordinasi, keterlambatan KAK, penetapan pemenang lelang, penandatanganan kontrak, serta lelang ulang karena penyedia tidak memenuhi spesifikasi

6.2 Saran

1. Pada faktor perencanaan anggaran, perlu dilakukan pelatihan teknis secara berkala bagi aparatur perangkat daerah agar mampu menyusun perencanaan anggaran berbasis data dan analisis kebutuhan yang lebih akurat, sehingga dapat mengurangi kebiasaan copy-paste dokumen dari tahun sebelumnya. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis digital perlu dimaksimalkan untuk mendukung penyusunan anggaran yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi.
2. Pada faktor administrasi, perlu melakukan evaluasi kembali kebutuhan kerja pegawai, agar tidak terjadi penumpukan tugas atau beban kerja yang tinggi.
3. Pada faktor Sumber Daya Manusia, BKAD perlu menyelenggarakan pelatihan rutin terkait penggunaan aplikasi keuangan daerah dan keterampilan komputer dasar bagi seluruh pegawai, khususnya bagi user yang belum kompeten dan diperlukan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur untuk memantau sejauh mana peningkatan kompetensi pegawai berdampak pada percepatan penyerapan anggaran.
4. Pada faktor pencairan dana, BKAD perlu menyusun proyeksi kas yang lebih realistis agar dana operasional dapat tersedia sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan program tidak tertunda dan perlu dibuat mekanisme penyaluran dana operasional secara bertahap sesuai kebutuhan triwulan, agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai tepat waktu.
5. Pada faktor Dana Alokasi Umum, pemerintah daerah perlu menyusun rencana kas yang memperhitungkan potensi keterlambatan transfer DAU,

misalnya dengan menyiapkan dana talangan sementara dari pos lain untuk membiayai belanja wajib seperti gaji pegawai, Memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD, sehingga ketergantungan pada DAU dapat dikurangi.

6. Pada faktor pengadaan barang dan jasa, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pejabat pengelola keuangan, unit layanan pengadaan (ULP), serta perangkat daerah pengguna anggaran, agar jadwal penyusunan KAK dapat diselesaikan tepat waktu dan memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap tahapan pengadaan agar setiap keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.